


ANALISIS KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN UNTUK MENDUKUNG TRANSPARANSI DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP KRAKATAU

Miranti Agustina¹, Nurhikmah Berasa², Mella Afrina³, Nurbaiti⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[1mirantiagustina593@gmail.com](mailto:mirantiagustina593@gmail.com), [2nurhikmahberasa27@gmail.com](mailto:nurhikmahberasa27@gmail.com),

[3mellaafрина9@gmail.com](mailto:mellaafрина9@gmail.com), [4nurbaiti@uinsu.ac.id](mailto:nurbaiti@uinsu.ac.id)

<p>Menerima: 12/12/2025</p> <p>Diterima: 12/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 13/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak <i>This study aims to analyze the fundamental concept of Management Information Systems (MIS) in supporting transparency at Bank Syariah Indonesia (BSI) Krakatau Sub-Branch Office. Transparency is one of the main principles of sharia governance, playing a crucial role in building customer trust and enhancing the accountability of Islamic financial institutions. The research employs a descriptive qualitative method using a case study approach at BSI Krakatau Sub-Branch through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the application of basic MIS concepts at BSI Krakatau has contributed to improving information disclosure, accelerating service processes, and enhancing the effectiveness of internal supervision. However, further optimization is needed in data integration and the comprehensive use of digital technology. This study concludes that MIS plays a strategic role in realizing transparency and good governance in Islamic banking institutions.</i></p> <p>Keywords : <i>Transparency, Management Information System, Bank Syariah Indonesia, Accountability</i></p>
---	---

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia saat ini menempati posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus menjadi instrumen transformasi sistem keuangan menuju arah yang lebih etis dan berkeadilan. Pertumbuhan industri perbankan syariah yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip yang mendasarinya seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan moral sekaligus pembeda utama dari perbankan konvensional. Salah satu prinsip yang paling menonjol dalam operasional perbankan syariah adalah transparansi (keterbukaan informasi). Dalam Islam, transparansi bukan hanya aspek administratif, tetapi juga bagian dari amanah yang bernilai ibadah. Al-Qur'an melalui (*Al-Qur'an Al-Karim: Surat Al-Baqarah Ayat 282, n.d.*) secara eksplisit menegaskan pentingnya pencatatan transaksi dan keterbukaan dalam setiap akad sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dan konflik di kemudian hari. Namun, di tengah kemajuan digitalisasi dan perkembangan sistem keuangan modern, transparansi dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contoh nyata terlihat pada Bank Syariah Indonesia (BSI), lembaga hasil merger tiga bank syariah nasional pada tahun 2021. BSI menjadi tonggak penting dalam sejarah perbankan syariah Indonesia, namun juga menghadapi kompleksitas baru, terutama dalam proses integrasi sistem informasi dari ketiga lembaga pendahulunya. Berdasarkan (BSI Annual Report, 2023) permasalahan utama yang dihadapi mencakup: (1) keterbatasan akses publik terhadap informasi keuangan dan kinerja sosial bank, (2) ketidakkonsistenan format pelaporan antar-unit yang menyebabkan keterlambatan distribusi data, (3) belum optimalnya integrasi sistem informasi manajemen pasca-merger, serta (4) kurangnya sinergi antara aspek teknologi dan prinsip tata kelola

syariah. Permasalahan ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi di BSI masih menghadapi kesenjangan antara idealitas nilai syariah dengan realitas operasional lembaga keuangan modern.

Dalam konteks inilah, Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi instrumen strategis untuk menjawab tantangan tersebut. SIM tidak hanya dipahami sebagai perangkat teknologi, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang menggabungkan manusia, prosedur, data, dan teknologi guna menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu bagi pengambilan keputusan. Menurut (Laudon, J. P., & Laudon, 2018), SIM merupakan tulang punggung manajemen modern karena mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan organisasi secara efektif. Sementara (Romney & Steinbart, 2018) menjelaskan bahwa SIM memiliki fungsi vital dalam menciptakan internal control yang andal serta memperkuat akuntabilitas. Dalam konteks perbankan syariah, SIM idealnya berfungsi ganda: tidak hanya meningkatkan efisiensi dan ketepatan data, tetapi juga memastikan keterbukaan dan kejujuran informasi sesuai dengan prinsip syariah. Kajian-kajian terdahulu tentang SIM dan transparansi dalam lembaga keuangan telah dilakukan oleh berbagai peneliti. (Asutay, 2007) menyoroti aspek etika dan moral dalam sistem keuangan Islam, sementara (Hassan & Lewis, 2014) mengaitkan tata kelola syariah dengan akuntabilitas publik. Penelitian lain oleh (Soleha et al., 2022) menelaah penerapan SIM dalam mendukung ekonomi digital di BSI, dan (Irmayani, N., & Nasution, 2023) mengulas peran e-banking sebagai bagian dari sistem informasi modern di bank syariah. (Aprilia & Sisdianto, 2024) meneliti hubungan antara teknologi informasi dan transparansi pelaporan keuangan, sedangkan (Wilmar Ervanni et al., 2025) menekankan aspek akuntansi syariah dalam mewujudkan transparansi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut sebagian besar masih bersifat teknis-operasional dan belum secara eksplisit mengkaji integrasi antara SIM dan nilai-nilai transparansi syariah sebagai sistem tata kelola yang menyeluruh.

Meskipun sistem perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil merger tiga bank besar, berbagai penelitian menunjukkan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas masih menjadi tantangan utama dalam implementasi tata kelola syariah. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada kinerja keuangan dan kepatuhan syariah, namun belum banyak yang menyoroti bagaimana kualitas Sistem Informasi Manajemen (SIM) berperan langsung dalam meningkatkan transparansi pelaporan dan akuntabilitas publik. Penelitian lapangan di BSI Kantor Cabang Pembantu Krakatau menunjukkan bahwa SIM mampu meningkatkan keakuratan data dan mempercepat proses layanan, namun pada tingkat korporasi, pasca-merger BSI masih menghadapi kendala integrasi sistem, harmonisasi data, serta sinkronisasi format pelaporan. Hal ini menimbulkan potensi keterlambatan, inkonsistensi, dan keterbatasan dalam penyampaian informasi yang transparan kepada nasabah maupun pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, terdapat gap of literature yang cukup jelas. Penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada efektivitas sistem informasi dalam meningkatkan efisiensi organisasi, sementara dimensi etik, normatif, dan spiritual yang menjadi ruh perbankan syariah belum banyak dibahas. Selain itu, konteks pasca-merger BSI yang menghadirkan tantangan integrasi sistem dari tiga bank syariah besar juga masih jarang dieksplorasi secara ilmiah. Padahal, kondisi tersebut menjadi kasus unik yang sangat relevan untuk dikaji dari perspektif manajemen informasi dan tata kelola transparansi syariah. Penelitian terdahulu pada umumnya telah mengkaji SIM dari perspektif teknis dan efisiensi operasional, namun penelitian yang menelaah peran SIM sebagai instrumen tata kelola berbasis nilai-nilai syariah masih terbatas, khususnya pada konteks integrasi sistem pasca-merger di Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar Sistem Informasi Manajemen dan mengkaji perannya dalam memperkuat transparansi perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang integrasi antara sistem informasi dan prinsip

syariah dalam konteks manajemen modern, serta memberikan landasan konseptual bagi penguatan tata kelola transparansi di lembaga keuangan syariah.

TINJAUAN TEORETIS

Prinsip Transparansi dalam Perbankan Syariah

Transparansi merupakan salah satu prinsip mendasar dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Secara konseptual, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan lembaga dalam menyediakan informasi yang benar, lengkap, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, baik nasabah, regulator, investor, maupun masyarakat luas. Dalam konteks perbankan syariah, transparansi tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan akuntansi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Menurut (Asutay, 2007), transparansi merupakan salah satu pilar utama dari sharia governance karena berfungsi menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga keuangan Islam. Tanpa adanya keterbukaan informasi, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*sidq*), dan tanggung jawab (*amanah*) sulit diwujudkan dalam praktik ekonomi modern. Sementara itu, (Hassan & Lewis, 2014) menegaskan bahwa transparansi dalam perbankan syariah tidak terbatas pada penyajian laporan keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap hukum Islam, akuntabilitas sosial, dan pelaporan etis kepada masyarakat. Dengan kata lain, transparansi dalam sistem keuangan Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan perbankan konvensional karena menyatukan aspek ekonomi, etika, dan spiritual.

Secara normatif, prinsip transparansi memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam.

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.

Al-Qur'an dalam (*Al-Qur'an Al-Karim: Surat Al-Baqarah Ayat 282*, n.d.) menekankan pentingnya pencatatan transaksi dan kejelasan akad dalam setiap muamalah. Ayat tersebut bukan hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga mengandung nilai moral bahwa setiap individu bertanggung jawab atas kejujuran dan keterbukaannya dalam bertransaksi. Dengan demikian, transparansi dalam Islam merupakan bentuk implementasi dari prinsip amanah (kepercayaan) dan hisbah (pengawasan moral), yang menjadi landasan etis dalam seluruh kegiatan ekonomi dan bisnis. Dalam praktiknya, penerapan transparansi pada lembaga keuangan syariah diwujudkan melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, pelaporan keuangan yang terbuka dan akurat, di mana bank wajib menyediakan laporan keuangan tahunan yang dapat diakses publik dan memenuhi standar akuntansi syariah yang berlaku. Kedua, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi memastikan bahwa seluruh produk, jasa, dan kebijakan bank telah sesuai dengan prinsip syariah. DPS juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan melakukan pengawasan langsung terhadap aktivitas bank. Ketiga, penerapan prinsip disclosure, yaitu keterbukaan terhadap informasi material yang relevan bagi para pemangku kepentingan, seperti laporan laba rugi, tingkat pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*), serta kebijakan sosial dan zakat perusahaan (Antonio, 2001).

(Niken et al., 2025) Transparansi juga menjadi indikator utama dalam menilai tingkat *good corporate governance* (GCG) pada bank syariah. Semakin terbuka lembaga dalam menyampaikan informasi, semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadapnya. Sebaliknya, minimnya transparansi dapat menimbulkan persepsi negatif, menurunkan kredibilitas lembaga, dan bahkan memicu risiko reputasi. Dalam hal ini, keterbukaan bukan hanya kewajiban administratif kepada regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap masyarakat sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Selain itu, transparansi dalam perbankan syariah juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan

(sustainability). Bank syariah tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai aktivitas sosial, dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta pembiayaan sektor produktif menjadi bagian integral dari laporan transparansi lembaga. Dengan demikian, transparansi dalam perbankan syariah tidak hanya bersifat teknis-administratif, melainkan juga merupakan refleksi dari nilai-nilai Islam yang menuntut kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip ini berperan penting dalam membangun kepercayaan publik (public trust), memperkuat legitimasi lembaga, serta memastikan keberlanjutan sistem keuangan syariah di tengah persaingan global. Semakin tinggi tingkat transparansi yang dijalankan oleh bank syariah, semakin kuat pula citra dan reputasinya sebagai lembaga yang profesional, amanah, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu fondasi utama dalam pengelolaan organisasi modern, termasuk lembaga keuangan seperti perbankan syariah. Secara umum, SIM dapat didefinisikan sebagai suatu sistem terpadu yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien di semua tingkatan manajemen. Menurut (Laudon, J. P., & Laudon, 2018), SIM bukan hanya sekadar perangkat lunak atau teknologi, tetapi merupakan kombinasi harmonis antara manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang bekerja bersama untuk menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Dalam konteks manajerial, keberadaan SIM menjadi kebutuhan mendasar karena informasi merupakan sumber daya strategis yang menentukan keberhasilan pengambilan keputusan. Manajer memerlukan data yang cepat dan akurat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Melalui SIM, data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber diolah menjadi informasi yang memiliki nilai guna, seperti laporan keuangan, analisis risiko, data nasabah, hingga laporan kinerja cabang. Dengan demikian, SIM berperan tidak hanya sebagai supporting tool, tetapi juga sebagai decision-making instrument yang memperkuat tata kelola organisasi.

(Romney & Steinbart, 2018) menegaskan bahwa SIM yang efektif memiliki beberapa komponen penting, yaitu:

1. Sumber data yang valid dan terintegrasi, yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai departemen atau unit kerja dan disatukan dalam satu sistem terpadu agar tidak terjadi duplikasi atau ketidaksesuaian.
2. Teknologi pemrosesan informasi yang andal, mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan komunikasi yang mampu memproses data secara cepat dan aman.
3. Pengguna atau manajer yang kompeten, yakni individu yang memahami cara membaca, menafsirkan, dan memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan.
4. Mekanisme pengendalian internal, yaitu prosedur untuk memastikan keakuratan, keamanan, dan keandalan data agar terhindar dari manipulasi atau penyalahgunaan.

Keempat komponen tersebut menjadikan SIM tidak hanya berperan sebagai sistem teknis, tetapi juga sebagai alat pengendalian manajerial (management control system). Dalam praktiknya, SIM membantu perusahaan dalam mengkoordinasikan berbagai fungsi mulai dari keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, hingga operasional sehingga seluruh aktivitas organisasi berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perbankan, peran SIM menjadi semakin penting karena lembaga keuangan beroperasi dengan volume data yang besar, transaksi yang kompleks, dan risiko yang tinggi. SIM membantu bank dalam mengelola laporan keuangan, memantau arus kas, mengontrol risiko kredit, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi otoritas keuangan. Selain itu, SIM juga mendukung pelaporan keuangan secara digital dan real time kepada pihak eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Tanpa sistem

informasi yang kuat, keputusan manajemen akan cenderung lambat, tidak akurat, dan berisiko menimbulkan kesalahan kebijakan (Jogiyanto, 2024).

Pada lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), fungsi SIM memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini karena sistem keuangan syariah tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etis dan spiritual Islam, seperti kejujuran (*sidq*), amanah, dan keadilan (*adl*). Oleh karena itu, SIM dalam perbankan syariah berperan ganda: selain sebagai alat manajemen data dan informasi, juga sebagai instrumen moral dan religius untuk menjamin amanah dalam pengelolaan dana umat. Melalui sistem yang transparan, terdokumentasi, dan dapat diaudit, setiap transaksi keuangan dapat ditelusuri secara jelas sehingga mencegah terjadinya penyimpangan seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), dan *riba* (keuntungan berlebih yang tidak sah). Sebagai contoh, sistem informasi pembiayaan berbasis syariah akan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan memiliki akad yang jelas, sesuai prinsip *fiqh muamalah*, dan tercatat dalam sistem dengan bukti dokumentasi yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa SIM dalam lembaga keuangan syariah bukan hanya perangkat administratif, tetapi juga sarana untuk menegakkan prinsip syariah dalam tata kelola keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SIM merupakan pilar utama dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Ia berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kejujuran sistem keuangan berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam era digital saat ini, SIM bahkan menjadi jembatan antara teknologi modern dan prinsip-prinsip syariah, menjadikan manajemen informasi bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga bagian integral dari tanggung jawab moral dan spiritual lembaga perbankan syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang diresmikan pada 1 Februari 2021. Pembentukan BSI bertujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional melalui peningkatan efisiensi, daya saing, dan kapasitas pembiayaan dalam mendukung ekonomi syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, BSI beroperasi dengan menghindari praktik *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi), serta menegakkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnisnya (Antonio, 2001). Operasional BSI dilaksanakan melalui berbagai akad yang sesuai dengan ketentuan syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *wakalah* sebagai alternatif dari sistem bunga konvensional yang dilarang dalam Islam (Karim, 2010). Seluruh produk dan kegiatan operasional BSI diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan harus mengikuti ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Dalam praktik tata kelola, BSI menerapkan konsep *sharia governance* atau tata kelola berbasis syariah, yaitu sistem pengawasan dan pengendalian yang memastikan seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta standar etika bisnis syariah (Hameed et al., 2004). Konsep ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik sebagai bagian dari implementasi nilai amanah dalam pengelolaan dana masyarakat. Transparansi di perbankan syariah tidak hanya bersifat teknis melalui laporan keuangan, tetapi juga bersifat moral dan spiritual karena berkaitan dengan tanggung jawab lembaga terhadap kepercayaan umat (Sukmana, 2020). Dalam konteks modern, penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi elemen penting dalam menunjang prinsip-prinsip tersebut. SIM berfungsi sebagai sarana untuk mengintegrasikan data transaksi, pengawasan kepatuhan, serta proses pelaporan keuangan dan audit, sehingga

memudahkan pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi operasional (Laudon, J. P., & Laudon, 2018).

Akuntabilitas

Secara konseptual, akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam tata kelola organisasi yang menuntut setiap entitas untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang memiliki hak atas informasi tersebut. Menurut (Gray, R., Owen, D., & Adams, 1996), akuntabilitas tidak hanya berarti kewajiban untuk melaporkan hasil kegiatan secara finansial, tetapi juga mencakup dimensi etika dan sosial yang berkaitan dengan keterbukaan terhadap publik. Dalam konteks organisasi keuangan, akuntabilitas mencerminkan sejauh mana lembaga mampu menunjukkan integritas, transparansi, serta tanggung jawab terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders) melalui sistem pelaporan yang jujur dan dapat dipercaya. Dalam bidang perbankan, akuntabilitas sering dikaitkan dengan konsep good corporate governance (GCG) yang mencakup empat prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan (Otoritas Jasa Keuangan., 2017). Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, bank diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah praktik penyimpangan, serta memastikan seluruh kebijakan dan aktivitasnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika. Bagi bank syariah, konsep akuntabilitas memiliki makna yang lebih luas karena tidak hanya menyangkut kewajiban terhadap pemilik modal atau regulator, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk tanggung jawab spiritual (*hablum minallah*) dan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sosial (*hablum minannas*) (Antonio, 2001).

Dalam perspektif syariah Islam, akuntabilitas dikenal dengan istilah *mas'uliyah*, yang mengandung arti tanggung jawab moral atas segala tindakan yang dilakukan oleh manusia di dunia. Akuntabilitas dalam Islam bersifat holistik karena mencakup tiga dimensi, yaitu akuntabilitas terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama manusia (Triuwono, 2011). Oleh karena itu, akuntabilitas dalam perbankan syariah tidak hanya diukur dari sejauh mana lembaga melaksanakan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi, tetapi juga dari kesesuaian perilaku, produk, dan kebijakan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), sehingga akuntabilitas syariah tetap terjaga (Hameed et al., 2004). Secara teoritis, akuntabilitas juga dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan klasik, antara lain *agency theory* dan *stakeholder theory*. Berdasarkan *agency theory* (Jensen, M. C., Meckling, 1976), akuntabilitas muncul sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik dana). Dalam konteks perbankan syariah, akuntabilitas diwujudkan melalui laporan keuangan, laporan kepatuhan syariah, serta audit eksternal dan internal yang dilakukan secara berkala. Sementara itu, *stakeholder theory* (Freeman, 1984) memandang akuntabilitas sebagai kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap aktivitasnya kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, karyawan, regulator, dan masyarakat.

Dalam praktiknya, akuntabilitas di bank syariah diwujudkan melalui beberapa aspek, antara lain:

1. Akuntabilitas finansial, yaitu tanggung jawab lembaga dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar, transparan, dan sesuai prinsip akuntansi syariah (AAOIFI, 2015);
2. Akuntabilitas syariah, yang memastikan seluruh kegiatan operasional dan produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh DPS;
3. Akuntabilitas sosial, yang berkaitan dengan kepedulian lembaga terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran zakat, infak, sedekah, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR); serta

4. Akuntabilitas manajerial, yaitu kewajiban pimpinan dan pegawai untuk menjalankan tugas secara profesional, efektif, dan sesuai dengan etika kerja Islami (Sukmana, 2020).

Dalam konteks digitalisasi dan integrasi sistem di era modern, Sistem Informasi Manajemen (SIM) berperan penting dalam mendukung akuntabilitas bank syariah. Melalui SIM, seluruh transaksi dapat dicatat secara real-time, audit trail dapat dipantau dengan mudah, dan laporan dapat diakses oleh pihak yang berwenang dengan lebih transparan (Laudon, J. P., & Laudon, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi yang baik tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun akuntabilitas syariah yang komprehensif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam bank syariah mencakup aspek spiritual, etika, dan profesional yang saling berkaitan. Akuntabilitas tidak sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam yang menuntut kejujuran (sidq), tanggung jawab (amanah), dan keadilan (adl) dalam setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi, tata kelola syariah, dan budaya organisasi yang berbasis nilai-nilai Islam menjadi kunci utama dalam mewujudkan perbankan syariah yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi lapangan yang berfokus pada penerapan prinsip transparansi melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Krakatau. Rancangan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana sistem informasi diterapkan dalam mendukung keterbukaan dan akuntabilitas operasional bank syariah. Populasi penelitian mencakup seluruh pegawai BSI KCP Krakatau, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan. Narasumber utama adalah pegawai bagian Customer Service (CS) bernama Bapak Rahmat yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan prinsip transparansi terhadap nasabah. Pengukuran dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui penilaian terhadap tiga aspek utama, yaitu keterbukaan informasi, kejelasan akad dalam setiap transaksi, dan akuntabilitas pelaporan. Peneliti menginterpretasikan hasil wawancara dan observasi untuk menggambarkan sejauh mana prinsip transparansi dijalankan sesuai nilai-nilai syariah.

Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung di lingkungan kerja BSI KCP Krakatau. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan dan pengalaman pegawai mengenai penerapan SIM, sementara observasi dilakukan untuk melihat praktik transparansi secara nyata dalam proses pelayanan dan operasional perbankan. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Oktober 2025.

Model penelitian ini menjelaskan hubungan antara Sistem Informasi Manajemen sebagai variabel utama dan transparansi sebagai variabel hasil. Hubungan keduanya bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana pemanfaatan SIM dapat meningkatkan keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi yang menjelaskan pola penerapan transparansi melalui SIM, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan lapangan untuk menilai efektivitas penerapan prinsip transparansi di BSI KCP Krakatau. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan validitas serta konsistensi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Sistem Informasi Manajemen, Transparansi, dan Akuntabilitas Syariah

Dalam tata kelola lembaga keuangan Islam, integrasi antara Sistem Informasi Manajemen (SIM), transparansi, dan akuntabilitas syariah merupakan elemen penting dalam mewujudkan prinsip sharia governance yang berkeadilan, jujur, dan berorientasi nilai. Dalam perspektif Islam, keterbukaan informasi dan tanggung jawab bukan hanya aspek administratif, tetapi juga wujud nyata dari nilai amanah dan hisbah, yaitu prinsip moral untuk mengelola harta umat dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan masyarakat (Triyuwono, 2011). Oleh karena itu, dalam konteks perbankan syariah, penerapan SIM tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pengolahan data, melainkan juga sebagai instrumen etis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga. Sejumlah penelitian terdahulu (Soleha et al., 2022); (Aprilia & Sisdianto, 2024) menunjukkan bahwa penggunaan SIM berpengaruh positif terhadap efisiensi, kecepatan pelaporan, dan keandalan data di sektor perbankan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis, seperti efisiensi operasional dan kecepatan akses data, tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai syariah. Padahal, dalam prinsip Islam, sistem informasi harus dirancang untuk mendukung kejujuran (sidq), keadilan (adl), dan tanggung jawab (amanah), sehingga sistem informasi yang baik tidak bersifat netral secara nilai, tetapi menjadi sarana internalisasi prinsip-prinsip moral Islam dalam proses manajemen (Irmayani, N., & Nasution, 2023).

Integrasi antara SIM, transparansi, dan akuntabilitas syariah dapat dipahami sebagai kesatuan konsep yang saling memperkuat. SIM berfungsi sebagai alat utama untuk menghasilkan data dan laporan yang akurat serta real-time, sehingga mendukung transparency dalam setiap aktivitas operasional. Transparansi yang memadai kemudian menjadi fondasi bagi terciptanya akuntabilitas, karena pihak manajemen dapat memberikan laporan yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan kepada regulator, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan masyarakat (Hameed et al., 2004). Dalam kerangka ini, transparansi dan akuntabilitas tidak bisa dipisahkan — transparansi menjadi syarat bagi akuntabilitas, sementara akuntabilitas menjamin bahwa transparansi dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Dari sisi implementasi di Bank Syariah Indonesia (BSI), integrasi ini menghadapi tantangan besar pasca-merger tahun 2021 yang menyatukan tiga entitas besar, yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Perbedaan sistem teknologi, format pelaporan, serta kebijakan pengelolaan data menyebabkan integrasi SIM tidak dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh (BSI Annual Report, 2023). Akibatnya, beberapa hambatan muncul seperti inkonsistensi data, keterlambatan pelaporan, dan kesulitan dalam mengawasi aktivitas secara transparan di seluruh unit kerja. Meskipun demikian, proses harmonisasi sistem terus dilakukan dengan tujuan membangun platform informasi yang efisien, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, Customer Service di BSI Kantor Cabang Pembantu Krakatau, menunjukkan bahwa penerapan SIM di unit cabang telah membawa dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas operasional. Beliau menjelaskan bahwa sistem informasi kini memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time dan mempermudah pelaporan kepada manajemen dan DPS. Hal ini meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses pengawasan internal, sehingga tanggung jawab manajemen terhadap regulator dan nasabah menjadi lebih terukur. Namun, Bapak Rahmat juga mengungkapkan adanya kendala integrasi antar-cabang akibat perbedaan sistem lama dari tiga bank sebelumnya. Menurut beliau, diperlukan pelatihan dan penguatan kapasitas SDM agar seluruh pegawai memahami prinsip-prinsip pelaporan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai nilai syariah dan prinsip amanah. Pandangan tersebut sejalan dengan temuan (Wilmar Ervanni et al., 2025), yang menegaskan bahwa tanpa integrasi antara teknologi informasi, transparansi, dan akuntabilitas, sistem informasi hanya akan menjadi alat administratif yang kehilangan makna moral. Oleh karena itu, dalam konteks perbankan syariah, SIM perlu dipandang sebagai alat pengawasan moral (moral monitoring tool), yang tidak hanya mengontrol efisiensi, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan etika Islam. Dengan kata

lain, SIM berfungsi ganda: sebagai sarana teknologis untuk meningkatkan efektivitas organisasi, dan sebagai mekanisme etis untuk menjaga integritas lembaga.

Dalam kerangka maqasid al-shariah, integrasi SIM, transparansi, dan akuntabilitas juga merupakan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan syariah, yaitu perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan (adl), dan kemaslahatan (maslahah). Sistem informasi yang terintegrasi dengan prinsip syariah akan membantu lembaga menyalurkan dana dengan lebih adil, memastikan pelaporan zakat dan infak dilakukan secara terbuka, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2021) juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari Good Corporate Governance (GCG) yang menjadi indikator utama kesehatan lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, integrasi antara Sistem Informasi Manajemen, transparansi, dan akuntabilitas syariah tidak hanya merupakan inovasi teknologis, tetapi juga implementasi nilai moral dan spiritual dalam tata kelola keuangan Islam. Penerapan sistem informasi berbasis syariah membantu lembaga seperti BSI untuk menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam seluruh proses bisnisnya. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan reputasi lembaga, tetapi juga menjadikan bank syariah sebagai institusi yang profesional, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam Mendukung Transparansi

Berdasarkan hasil wawancara dan penelaahan dokumen internal, penerapan SIM menjadi kunci utama dalam memastikan keterbukaan data di BSI KCP Krakatau. (Mei et al., 2025) SIM berfungsi untuk mencatat setiap transaksi, menyusun laporan harian, dan menyampaikan data ke kantor pusat secara otomatis. Sistem ini memungkinkan manajemen untuk memantau aktivitas cabang secara real-time dan mendeteksi potensi kesalahan pelaporan. Pegawai bagian operasional menjelaskan bahwa SIM di BSI tidak hanya digunakan untuk efisiensi kerja, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua informasi transaksi sesuai dengan prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, sistem ini juga membantu proses audit syariah dengan menyediakan data yang transparan dan mudah diakses. Hal ini memperlihatkan bahwa integrasi antara SIM dan prinsip syariah di BSI telah berjalan sinergis dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Dari hasil wawancara dan analisis literatur, ditemukan bahwa implementasi transparansi di BSI KCP Krakatau telah mencerminkan prinsip sharia governance, yaitu tata kelola berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral. Transparansi di sini bukan hanya tuntutan regulatif dari OJK, tetapi juga manifestasi nilai spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis tentang kejujuran dan pencatatan transaksi.

Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan (Asutay, 2007) dan (Hassan & Lewis, 2014) bahwa transparansi merupakan faktor utama pembentuk kepercayaan publik terhadap bank syariah. Selain itu, temuan ini memperkuat studi (Irmayani, N., & Nasution, 2023) yang menekankan pentingnya digitalisasi dan penggunaan SIM dalam memperkuat pengawasan internal bank. Dalam konteks BSI KCP Krakatau, SIM berfungsi tidak hanya sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai sarana etis untuk menjaga integritas lembaga dan mencegah terjadinya penyimpangan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi di BSI KCP Krakatau telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal keterbukaan laporan publik dan optimalisasi sistem digital agar informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Upaya peningkatan ini akan memperkuat posisi BSI sebagai lembaga keuangan syariah nasional yang tidak hanya unggul dalam teknologi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai keislaman yang autentik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penerapan prinsip transparansi di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Krakatau, dapat disimpulkan bahwa transparansi telah menjadi bagian

penting dalam tata kelola lembaga, tercermin dari keterbukaan informasi produk, kejelasan akad, dan pelaporan keuangan yang akuntabel melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM). Penggunaan SIM tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi data, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga. Integrasi nilai-nilai syariah seperti amanah, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan SIM menegaskan bahwa transparansi di BSI tidak sekadar bersifat administratif, melainkan juga berlandaskan tanggung jawab moral dan spiritual. Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar BSI KCP Krakatau terus meningkatkan kualitas transparansi dengan memperluas akses publik terhadap informasi melalui platform digital, memperkuat pelatihan pegawai terkait etika syariah dalam pelayanan, serta mengoptimalkan fungsi SIM agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan nasabah, sehingga kepercayaan dan reputasi lembaga sebagai bank syariah nasional dapat terus terjaga dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

● Buku

- AAOIFI. (2015). *Accounting, auditing and governance standards for Islamic financial institutions*. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik - Muhammad Syafi'i Antonio* - Google Buku. In *Gema Insani*.
<https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&source=v=onepage&q&f=false>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Gray, R., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and accountability: Changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. Prentice Hall.
- Jogiyanto, H. M. (2024). Sistem Informasi Manajemen. In *Akademia Pustaka* (Issue Desember,).
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Rajagrafindo Persada.
- Laudon, J. P., & Laudon, K. C. (2018). *Management information systems: managing the digital firm*. In *Revista de Administração Contemporânea* (16th ed., Vol. 7, Issue 1). Pearson.
<https://doi.org/10.1590/s1415-65552003000100014>
- Romney, & Steinbart, paul J. (2018). *Accounting Information Systems* Pearson. In *Educacao e Sociedade* (14th ed., Vol. 1, Issue 1). pearson.
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/
- Sukmana, R. (2020). *Keuangan sosial Islam: Teori dan praktik di Indonesia*. UIN Press.
- Triuwono, I. (2011). *Akuntansi Syariah: Perspektif, metodologi, dan teori*. Rajawali Pers.

● Artikel

- Asutay, M. (2007). Solution in Overcoming the Social Failure of Islamic Banking and Finance : Examining the Overpowering of Homoislamicus. *IIUM Journal of Economics and Management* 15, 15(2), 167–195.
- Irmayani, N., & Nasution, R. (2023). Peran E-Banking sebagai Bagian dari Sistem Informasi Modern pada Bank Syariah. *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 101–112.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

- Mei, V. N., Agiltriawan, A., Wakasara, R., Hanif, I. F., Teknik, F., Sistem, P., Teknologi, D., Muhammadiyah, U., & Hamka, P. (2025). *Analisis Sistem Informasi Manajemen Pada Sistem Enterprise Terhadap Bisnis Pengembangan Era Modern Informasi Manajemen (SIM) sebagai komponen penting dalam operasional perusahaan*.
- Soleha, S., Rahmawati, D. P., & Fadilah, N. A. (2022). Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Mendukung Ekonomi Digital di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Digital*, 3(1), 45–58.
- Wilmar Ervanni, O., Aulia, D., Nubila, H., & Hairul Rafli, J. (2025). Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Peran Akutansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Bank Syariah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(2), 401–414.

- **Proceeding**

- Hameed, S., Prasad, M., & White, L. (2004). Alternative disclosure and performance measures for Islamic banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age*.

- **Artikel dari situs web**

- Al-Qur'an al-Karim: Surat Al-Baqarah Ayat 282*. (n.d.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an / NU Online. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282>
- Aprilia, H., & Sisdiyanto, E. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Jurnal Media Akademik*, 13(2), 1–5. https://www.academia.edu/104746968/Peran_Teknologi_Informasi_Dalam_Meningkatkan_Transparansi_Dan_Akuntabilitas_Pemerintah_Daerah
- BSI Annual Report. (2023). Ekspansi Dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. *Laporan Tahunan BSI 2023*. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2023-ID.pdf>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2014). Handbook on Islam and economic life. *Handbook on Islam and Economic Life*, 1–696. <https://doi.org/10.4337/9781783479825>
- Niken, N. A. Z., Izzah Sholehah, & Azzah Nabila. (2025). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Syariah : Tinjauan Sistematis. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 18–33. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2614>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Pedoman tata kelola perbankan syariah (Good Corporate Governance)*. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/Pages/Pedoman-Tata-Kelola-Perbankan-Syariah-\(Good-Corporate-Governance\).aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/Pages/Pedoman-Tata-Kelola-Perbankan-Syariah-(Good-Corporate-Governance).aspx)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan perkembangan perbankan syariah di Indonesia*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-perbankan-syariah/Pages/Laporan-Perkembangan-Perbankan-Syariah-di-Indonesia-Tahun-2021.aspx>

- **Undang-Undang/Peraturan**

- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.